

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami----->

Vol. 2 No. 2 hal. 220 - 234

Pengawasan Pemeliharaan Insfrastruktur Di UPT PUPR Wilayah Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya

Supervision of Infrastructure Maintenance at UPT PUPR, Manonjaya Region, Tasikmalaya Regency

Iim Ibrahim

Email: i.ibrahimstia@gmail.com

Program Pascasarjana, STIA YPPT Priatim

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 200

Tasikmalaya - Jawa Barat - Indonesia

ABSTRACT

This study used a qualitative descriptive method, data collection was carried out using instruments in the form of observation, interviews, documentation study and literature study. This is often done when the population is small, less than 30 people. The results showed that the supervision of infrastructure maintenance at UPT PUPR in the Manonjaya Region of Tasikmalaya Regency had been carried out well, although there were still a few obstacles due to the feeling of reluctance between leaders and employees where the supervision process had to be improved even better. The paya supervision is carried out in order to improve the infrastructure maintenance system, namely by the direct supervision method carried out at the place of the activity, for example conducting unannounced inspections and examinations. Furthermore, with indirect supervision, namely supervision carried out by conducting monitoring and reviewing of reports from the officials or work units concerned, functional supervisory apparatus, legislative supervision and community supervision.

Keywords : supervision, infrastructure, maintenance

PENDAHULUAN

Tingkat keberhasilan suatu pembangunan yang dilaksanakan di suatu negara ataupun daerah dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai dan tingkat efektivitas pemeliharaan yang harus dilakukan secara berkala dan terus menerus. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran mengenai dampak kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan suatu negara dan daerah khususnya di bidang insfrastruktur.

Laju pertumbuhan ekonomi tersebut terbentuk dari berbagai macam sektor yang secara tidak langsung akan menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi di suatu negara dan daerah tersebut. Untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan tersebut, maka pembangunan perlu didukung oleh berbagai faktor baik ekonomi maupaun faktor non ekonomi. Salah satu faktor ekonomi yang sangat mendukung dan mempengaruhi jalannya roda pembangunan adalah infrastruktur. Infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan jalan, transportasi, telekomunikasi, bangunan gedung dan fasilitas publik

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami----->

Vol. 2 No. 2 hal. 220 - 234

lainnya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi.

Ketersediaan infrastruktur juga sangat dibutuhkan dalam pembangunan untuk mendorong lajunya perekonomian. Penyediaan infrastruktur selalu menjadi agenda penting dalam rencana pembangunan Indonesia. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting untuk mempercepat proses pembangunan nasional. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Menurut Prof. Dr. Sunyoto Usman berpendapat bahwa infrastruktur sangat penting dalam menyediakan pelayanan untuk mendukung pembangunan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup.

Dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang jalan, dijelaskan bahwa peran infrastruktur jalan adalah sebagai bagian prasarana transportasi yang mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, jalan sebagai prasarana bagi distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Kualitas infrastruktur, baik yang keras fisik (jalan, pelabuhan, irigasi), keras nonfisik (telepon, internet, listrik, air) memainkan peran vital karena merupakan penggerak perekonomian. Infrastruktur berhubungan dengan tiga hal (Hartanto, 2004) pertama, dukungan dasar bagi pengembangan pabrik/industri, misalnya, listrik, jalan dan jaringan telekomunikasi. Kedua, biaya produksi dan distribusi, baik bahan baku dan produk jadi. Ketiga, keterkaitan dengan pasar dan proses pemasaran.

Persoalan lain dalam hal perencanaan dan penyiapan proyek adalah pada partisipasi swasta. Sejak awal rencana pembangunan infrastruktur di Indonesia tidak ingin membebaskan APBN. Kita ingin ada partisipasi swasta. Dalam perencanaan pembangunan infrastruktur di RPJMN 2015-2019 disebutkan bahwa dari kebutuhan pendanaan infrastruktur sebesar Rp 4.197 triliun, sebesar 55% diharapkan berasal dari investasi badan usaha swasta. Untuk itu diperlukan dokumen proyek yang layak dan bisa memberikan penjelasan kepada swasta. Kualitas desain proyek selama ini dianggap kurang meyakinkan para investor untuk berinvestasi dalam proyek pembangunan infrastruktur. Selain itu desain proyek yang dibuat belum memenuhi standar internasional. Untuk itulah KPPIP mendapat mandat salah satunya untuk menyiapkan dokumen desain penyiapan proyek berstandar internasional dalam bentuk dokumen pra studi kelayakan atau Outline Business Case (OBC) dan penetapan skema pendanaan. Dalam dokumen penyiapan proyek tertera berbagai keterangan informasi mengenai proyek, seperti nilai investasi, tingkat pengembalian investasi, keuntungan finansial yang akan didapat, termasuk di dalamnya adalah fasilitas yang ditawarkan pemerintah serta proyeksi resiko investasi.

Secara lebih rinci penyediaan infrastruktur terhadap pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut: (1) mempercepat dan menyediakan barang-barang yang dibutuhkan, (2) tersedianya infrastruktur akan memungkinkan tersedianya barang-barang kebutuhan masyarakat dengan biaya lebih murah, (3) infrastruktur yang baik dapat memperlancar transportasi yang pada gilirannya merangsang adanya stabilitas dan mengurangi disparitas harga antar daerah, (4) infrastruktur yang memperlancar jasa transportasi menyebabkan hasil produksi daerah dapat diangkut dan dijual ke pasar (Basri, 2002 : 45)

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami----->

Vol. 2 No. 2 hal. 220 - 234

Menurut World Bank kaitan infrastruktur jalan dengan biaya transportasi yaitu apabila kualitas infrastruktur jalan suatu daerah buruk maka akan mengakibatkan kenaikan biaya transportasi sehingga menurunkan daya saing produk-produk daerah tersebut dibanding produk daerah yang lain. dari pulau Kalimantan ke pulau Jawa. Buruknya kualitas jalan di suatu daerah atau negara menempatkan biaya transportasi yang lebih tinggi dibanding dengan suatu daerah yang memiliki infrastruktur jalan yang baik.

Hal ini juga sama halnya dengan peranan transportasi bagi ekonomi. Dengan demikian ketersediaan infrastruktur jalan yang memadai sangat diperlukan untuk terwujudnya pembangunan disuatu daerah. Jalan dan jembatan merupakan prasarana yang dibutuhkan dalam proses pembangunan. Tidak hanya menghubungkan satu daerah dengan daerah lainnya, atau menghubungkan satu desa dengan desa lainnya atau kota, tetapi yang lebih terasa manfaatnya adalah dalam penyaluran informasi, penyaluran sarana produksi, penyaluran hasil atau produksi, serta menjamin kelancaran transportasi dan komunikasi.

Selain itu, infrastruktur merupakan pilar menentukan kelancaran arus barang, jasa, manusia, uang dan informasi dari satu zona pasar ke zona pasar lainnya. UPT wilayah Manonjaya merupakan satu wilayah yang berada di Kabupaten Tasikmalaya. UPT wilayah Manonjaya terdiri dari empat kecamatan yaitu kecamatan Manonjaya, kecamatan Gunung Tanjung, kecamatan Cineam dan kecamatan Karang Jaya. Wilayah Manonjaya memiliki areal yang cukup terjal dengan dikelilingi bukit dan pegunungan, oleh karena itu secara umum mata pencaharian masyarakat yang ada di wilayah Manonjaya adalah petani. Adapun struktur jalan penghubung antara kecamatan yang satu dengan kecamatan yang lain banyak ditemukan jembatan, sehingga faktor infrastruktur sangat mempengaruhi terhadap lajunya perekonomian di wilayah Manonjaya.

Kondisi infrastruktur di sebagian desa pada situasi saat ini sudah mulai dibangun yaitu dengan pembangunan jalan lintas desa, hal ini tentunya perlu adanya metode pengawasan guna untuk proses pembangunan infrastruktur dapat terlealisasi sesuai dengan tujuan pemerintah. Dengan demikian, proses pengawasan terhadap pola pemeliharaan infrastruktur perlu ditingkatkan karena apabila pengawasan tidak dilakukan, dikhawatirkan infrastruktur yang sedang dikerjakan atau yang sudah selesai dibangun dikhawatirkan tidak sesuai dengan tujuan pemerintah yaitu dapat mendongkrak sistem ekonomi yang lebih baik.

KAJIAN TEORI

Pengawasan Infrastruktur

Ada beberapa alasan mengapa pengawasan itu penting yaitu dengan adanya perubahan lingkungan organisasi berbagai perubahan lingkungan organisasi terjadi terus-menerus dan tak dapat dihindari, seperti munculnya inovasi produk dan pesaing baru, ditemukannya bahan baku. Melalui fungsi pengawasannya manajer mendeteksi perubahan yang berpengaruh pada barang dan jasa organisasi sehingga mampu menghadapi tantangan atau memanfaatkan kesempatan yang diciptakan perubahan yang terjadi.

Peningkatan kompleksitas organisasi Semakin besar organisasi, makin memerlukan pengawasan yang lebih formal dan hati-hati. Berbagai jenis produk harus diawasi untuk menjamin kualitas dan profitabilitas tetap terjaga. Semuanya memerlukan pelaksanaan fungsi pengawasan dengan lebih efisien dan efektif.

Meminimalisasikan tingginya kesalahan-kesalahan apabila para bawahan tidak membuat kesalahan, manajer dapat secara sederhana melakukan fungsi pengawasan. Tetapi kebanyakan anggota organisasi sering membuat kesalahan. Sistem pengawasan memungkinkan manajer mendeteksi kesalahan tersebut sebelum menjadi kritis.

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami----->

Vol. 2 No. 2 hal. 220 - 234

Kebutuhan manager untuk mendelegasikan wewenang Bila manager mendelegasikan wewenang kepada bawahannya tanggung jawab atasan itu sendiri tidak berkurang. Satu-satunya cara manager dapat menen-tukan apakah bawahan telah melakukan tugasnya adalah dengan mengimplementasikan sistem penga-wasan.

Ada beberapa alasan mengapa pengawasan itu penting, diantaranya :Perubahan lingkungan organisasi Berbagai perubahan lingkungan organisasi terjadi terus-menerus dan tak dapat dihindari, seperti munculnya inovasi produk dan pesaing baru. Melalui fungsi pengawasannya manager mendeteksi perubahan yang berpengaruh pada barang dan jasa organisasi sehingga mampu menghadapi tantangan atau memanfaatkan kesempatan yang diciptakan perubahan yang terjadi. Peningkatan kompleksitas organisasi Semakin besar organisasi, makin memerlukan pengawasan yang lebih formal dan hati-hati. Berbagai jenis produk harus diawasi untuk menjamin kualitas dan profitabilitas tetap terjaga. Semuanya memerlukan pelaksanaan fungsi pengawasan dengan lebih efisien dan efektif.

Meminimalisasikan tingginya kesalahan-kesalahan Bila para bawahan tidak membuat kesalahan, manager dapat secara sederhana melakukan fungsi pengawasan. Tetapi kebanyakan anggota organisasi sering membuat kesalahan. Sistem pengawasan memungkinkan manager mendeteksi kesalahan tersebut sebelum menjadi kritis.

Kebutuhan manager untuk mendelegasikan wewenang apabila manager mendelegasikan wewenang kepada bawahannya tanggung jawab atasan itu sendiri tidak berkurang. Satu-satunya cara manager dapat menen-tukan apakah bawahan telah melakukan tugasnya adalah dengan mengimplementasikan sistem pengawasan.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *kualitatif deskriptif*. Penelitian deskriptif berusaha menggambarkan suatu gejala sosial. Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat studi yang mempunyai tujuan untuk mempertahankan keutuhan (wholeness) dari obyek, artinya data yang dikumpulkan dalam rangka studi kasus dipelajari sebagai suatu keseluruhan yang terintegrasi, di mana tujuannya adalah untuk memperkembangkan pengetahuan yang mendalam mengenai obyek yang bersangkutan yang berarti bahwa studi kasus harus disifatkan sebagai penelitian yang eksploratif dan deskriptif. Penelitian yang kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan model-model matematik, statistik atau komputer.

Penelitian dilakukan di kantor Dinas PUPR UPT Manonjaya Tasikmalaya. Subyek penelitian kualitatif yang menjadi dasar acuan penelitian yaitu karyawan Dinas PUPR UPT Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya untuk memberikan informasi tentang pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Dinas PUPR UPT Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya. Adapun subyek yang dijadikan sumber informasi dalam fokus penelitian ini adalah orang-orang yang dapat memberikan data tentang sistem pengawasan dan teknik pengawasan yang dilakukan oleh kepala Dinas PUPR UPT Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya. Adapun orang-orang yang diteliti yaitu semua karyawan yang ada di Dinas PUPR UPT Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya.

Proses penelitian dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berpikir yang akan digunakan dalam penelitian. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dalam kegiatannya peneliti tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan dalam memberikan penafsiran terhadap hasilnya.

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami----->

Vol. 2 No. 2 hal. 220 - 234

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manfaat Pengawasan Infrastruktur Dinas PUPR UPT Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya

Banyak manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya pengawasan pemeliharaan infrastruktur yang dilakukan oleh kepala UPT PUPR Wilayah Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya. Oleh karena itu, dalam melakukan pengawasan hendaknya dipersiapkan terlebih dahulu sistem pengawasan yang sesuai dengan situasi dan kondisi pegawai maupun institusi yang bersangkutan. Di samping itu, perlu pula dipersiapkan pengawas yang memahami sistem pengawasan yang digunakan sehingga dalam melakukan pengawasan dapat dilakukan dengan baik. Dengan demikian, manfaat pengawasan dapat dirasakan oleh kedua pihak, baik pegawai maupun pimpinan/institusi.

Manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya pengawasan antara lain adalah mendorong peningkatan disiplin kerja. Dengan adanya pengawasan tersebut maka pegawai dapat mengetahui hasil pekerjaannya. Kemudian pegawai akan terdorong untuk berusaha meningkatkan efektivitas kerjanya. Dengan demikian, pengawasan pemeliharaan infrastruktur di UPT PUPR Wilayah Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya sudah dilakukan secara berkala.

Proses Pengawasan Pemeliharaan Infrastruktur di UPT PUPR Wilayah Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya

1. Dalam melaksanakan tugas kontrol Kepada Dinas PUPR, Kepala UPT PUPR Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya dapat melakukan agenda pertemuan formal dengan karyawan dalam rangka penelaahan terhadap satu masalah dalam proses pengawasan pemeliharaan infrastruktur.
2. Proses pengawasan juga dilakukan dengan meninjau tugas dan fungsi pejabat yang berwenang, dengan melakukan kegiatan pengawasan terhadap penggunaan anggaran pembangunan infrastruktur di UPT PUPR Wilayah Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya.
3. Bentuk Pengawasan Melalui Rapat Kerja dan Bentuk Pengawasan melalui Kunjungan Kerja.

Pengamatan Sistem Pemeliharaan Infrastruktur dan Laporan Hasil dari Pengamatan

Untuk mengetahui penetapan standar yang meliputi pengamatan system pemeliharaan infrastruktur dan laporan hasil dari pengamatan tersebut apakah penetapan standar system kerja dari sebuah kegiatan itu sudah sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Suatu kegiatan dibuat atas dasar rencana yang telah ditetapkan, dan rencana tersebut dilaksanakan oleh suatu kegiatan, kegiatan dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dengan pengawasan akan dapat diketahui sejauh mana rencana yang sudah dibuat itu dilaksanakan oleh para pegawai, apakah sudah sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan ataukah belum.

Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh hasil wawancara dengan Informan 1 pada tanggal 15 Januari 2021 yaitu sebagai berikut : “Menurut saya, pengawasan itu sangat penting ya pak yang berfungsi untuk meningkatkan efektivitas kerja para pegawai. Dengan pengawasan dapat diketahui capaian kerja para pegawai dengan

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami----->

Vol. 2 No. 2 hal. 220 - 234

diketuainya tingkat kinerja dan produktivitas dan potensinya agar dapat dipertahankan di samping untuk ditingkatkan. Dengan pengawasan akan dapat diketahui juga apakah pelaksanaan kegiatan itu sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Di samping itu pengawasan juga akan dapat mengetahui suatu kekeliruan/kesalahan sedini mungkin dan proses pengawasan yang dilakukan oleh kepala UPT PUPR Wilayah Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya sudah berjalan maksimal meskipun masih terdapat beberapa kendala yang berhubungan dengan kesibukan Kepala UPT Dalam melakukan pengawasan”.

Hal senada juga diungkapkan oleh Informan 2 pada wawancara tanggal 15 Januari 2021 pada pukul 12.30 WIB sebagai berikut : “Pengawasan sudah dilaksanakan dengan baik dan pengawasan sangat Penting ya Pak, dengan pengawasan kita akan tahu rencana-rencana kerja, pelaksanaan kerja dan sampai dimana hasil kerja para pegawai itu. Apakah sudah sesuai dengan rencana yang dibuat, kalau sudah sesuai terus apakah juga sudah tercapai tujuan yang sudah ditetapkan dari awal. Tetapi dengan mengawasi kita tidak berarti tidak percaya ya pak pada pegawai”.

Dari data di atas dapat dijelaskan bahwa pengawasan sudah berjalan sebagai mana mestinya yang berfungsi untuk untuk mengetahui apakah pelaksanaan kegiatan itu sudah sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Pengawasan yang Berhubungan Dengan Penilaian Kerja Dalam Pelaksanaan Pekerjaan

Dengan adanya pengawasan lebih mudah untuk mengetahui adanya kesalahan/kekeliruan yang dilakukan dalam pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan sedini mungkin, dengan diketahuinya kesalahan-kesalahan tersebut akan memudahkan untuk melakukan perbaikan terhadap kesalahan-kesalahan tersebut sehingga kesalahan yang sama tidak akan terulang lagi.

Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Informan 3 pada wawancara tanggal 20 Januari 2021 pada pukul 11.15 WIB yaitu sebagai berikut : “Sangat penting pengawasan itu pak dan pengawasan disini sudah dilaksanakan dengan baik yang dilakukan pada saat rapat kerja atau sidak langsung. Dengan pengawasan akan dapat diketahui kekeliruan-kekeliruan atau kesalahan-kesalahan pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Jika sudah diketahui kesalahan-kesalahannya maka akan ada usaha-usaha untuk memperbaikinya pak”.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Informan 4 pada wawancara tanggal 20 Januari 2021 pada pukul 13.15 WIB yaitu sebagai berikut : “Pengawasan itu untuk menemukan kekeliruan sedini mungkin dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan. Kalau sudah ada kekeliruan, maka akan ada tindakan perbaikannya. Jadi tidak hanya mengetahui kekeliruannya saja, tapi juga harus ada penyelesaiannya juga. Proses pengawasan itu sendiri sudah dilakukan secara berkala dan continue baik pengawasan langsung atau pengawasan tidak langsung”.

Dari data di atas dapat diketahui pengawasan pemeliharaan infrastruktur UPT PUPR Wilayah Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya sudah berjalan dengan optimal meskipun masih ada kendala yaitu adanya budaya sungkan antara Kepala UPT dengan para karyawannya. Pengawasan itu sendiri berguna untuk mengetahui kekeliruan/kesalahan sedini mungkin dalam pelaksanaan kegiatan. yang memiliki potensi untuk penilaian kerja sehingga proses hasil kinerja bias jauh lebih baik.

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami----->

Vol. 2 No. 2 hal. 220 - 234

Upaya Pengawasan Insfrastruktur Yang Dilakukan Oleh Pimpinan

Untuk mengetahui upaya pengawasan insfrastruktur yang dilakukan oleh pimpinan yaitu dengan metode CCTV yang dipasang 24 jam di dalam kantor dengan harapan para pegawai akan sadar dan melaksanakan dengan baik tugas pokok dan fungsinya tersebut. Kalau tidak ada kegiatan pengawasan maka para pegawai akan bekerja seandainya sendiri sehingga akan dapat melupakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Informan 5 pada wawancara tanggal 22 januari 2021 pada pukul 08.30 WIB sebagai berikut : “Betul sekali, pengawasan itu sangat penting untuk meningkatkan efektivitas kerja pegawai. Kalau tidak diawasi nanti semaunya sendiri dan pengawasan dari pimpinan sudah sesuai dengan tugas pimpinan. Karena dengan adanya pengawasan bisa terjadi optimalisasi pekerjaan, maksudnya masing-masing pegawai akan sadar terhadap Tupoksi (tugas pokok dan fungsi)-nya masing-masing”.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Informan 6 pada wawancara tanggal 22 januari pada pukul 13.15 yaitu sebagai berikut : “Pengawasan sangat penting sekali, dengan pengawasan dapat diketahui kinerja pegawai apakah sesuai dengan Tupoksinya atau belum. Kalau belum, tentunya nanti ada pengarahan atau bimbingan dari pimpinan, pimpinan selalu berupaya untuk ameningkatkan metode pengawasan yaitu dengan bekerjasama dengan masyarakat setempat jadi saya sebagai klaryawan tidak bias bekerja malas-malasan karena saya tahu pimpinan sangat dekat dengan masyarakat sekitar jadi apabila karyawan tidak bekerja dengan baik maka pimpinan akan mendapatkan informasi juga dari masyarakat”.

Dari pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan pemeliharaan insfrastruktur UPT PUPR Wilayah Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya sudah berjalan dengan maksimal yang berperan untuk mengetahui capaian kerja para pegawai apakah sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dengan pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan diharapkan para pegawai akan sadar dan melaksanakan dengan baik tugas pokok dan fungsinya tersebut.

Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan terhadap hasil kerja pegawai merupakan suatu hal yang sangat penting. Dengan pengawasan yang baik akan diketahui sejauh mana tujuan yang direncanakan sebelumnya dapat dicapai secara maksimal. Dengan pengawasan yang baik juga akan membantu pimpinan dalam mengevaluasi kegiatan atau hasil kerja kemudian dari hasil evaluasi tersebut pimpinan dapat mengambil tindakan perbaikan apabila ada kegagalan atau hambatan dalam pencapaian tujuan yang diinginkan organisasi. Pengawasan juga dapat dilakukan untuk mempertahankan hasil kerja yang telah sesuai dengan rencana agar tidak mengalami penurunan.

Adapun upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan pengawasan pemeliharaan insfrastruktur di Dinas PUPR UPT Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya adalah Pengawasan dilakukan oleh pimpinan sudah sangat maksimal mulai dari pengadaan CCTV 24 jam, kerjasama dengan masyarakat sekitar dan kunjungan sidak dengan tujuan untuk meningkatkan disiplin kerja para karyawan yang berdampak terhadap pemeliharaan insfrastruktur.

Pimpinan melakukan pengawasan langsung dengan tujuan fungsi yang harus dilaksanakan oleh seorang pimpinan terhadap semua pegawainya menitik beratkan terhadap pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya, hanya saja pengawasan

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami----->

Vol. 2 No. 2 hal. 220 - 234

lebih berupa pengawasan tidak langsung karena keterbatasan pimpinan untuk melakukan pengawasan secara langsung dikarenakan tugas dan tanggung jawab lainnya yang tidak hanya mengawasi kegiatan/aktivitas pegawai di kantor. Seperti yang diungkapkan oleh Informan 1 pada wawancara tanggal 27 Januari 2021 pada pukul 12.30 WIB sebagai berikut : “Disini yang melakukan pengawasan tentu saja pimpinan tertinggi, dalam hal ini Kepala UPT PUPR. Tapi untuk mengawasi seluruh pegawai atau staf dan seluruh pelaksanaan pekerjaannya tidak mungkin karena tugas saya tidak Cuma mengawasi saja, karena sering ada tugas-tugas diluar juga, jadi saya limpahkan ke Sub Bagian untuk mengawasi staf-stafnya sendiri. Sehingga itu dapat dinamakan secara tidak langsung ya pak, saya mengawasi, dan nanti itu diwujudkan dengan hasil laporan kerja”.

Hal senada juga diungkapkan oleh Informan 2 pada wawancara tanggal 28 Januari 2021 pada pukul 12.30 WIB yaitu sebagai berikut : “ Yang melakukan pengawasan itu ya atasan tertinggi, Kepala UPT PUPR. Tapi itu secara tidak langsung, karena ya tidak bisa pimpinan itu mengawasi tiap hari, tugas pimpinan itu kan banyak. Dan kalau pengawasan yang efektif itu ya atasan di Sub Bagian terhadap staf-stafnya karena rentan hierarkinya kan lebih dekat jadi mudah dalam mengawasinya”.

Pengawasan yang diterapkan di Dinas PUPR UPT Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya yaitu pengawasan melekat, pengawasan fungsional dan pengawasan struktura. Dilingkungan instansi pemerintahan pengawasan yang sering digunakan adalah pengawasan melekat, pengawasan fungsional dan pengawasan struktural. Semua jenis pengawasan ini diharapkan akan dapat meningkatkan sistem pengawasan yang lebih baik.

Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Informan 3 pada wawancara tanggal 28 Januari 2021 pada pukul 11.00 WIB sebagai berikut : “Secara normatif atau sesuai dengan norma pengawasan di instansi pemerintahan ya pak, yang diterapkan disini adalah pengawasan melekat, pengawasan fungsional, dan pengawasan struktural. Pengawasan melekat yaitu pengawasan yang dilakukan setiap atasan pada masing-masing jabatan struktural, pengawasan fungsional yaitu pengawasan terhadap tugas dan fungsi masing-masing jabatan, yang terakhir pengawasan struktural yaitu pengawasan yang dilakukan berdasarkan hierarki jabatannya”.

Hal senada juga diungkapkan oleh Informan 4 pada wawancara tanggal 28 Januari 2021 pada pukul 12.30 WIB sebagai berikut : “Pengawasan dilakukan secara melekat sesuai dengan Tupoksi serta kegiatan yang dilakukan, atau dengan kata lain pengawasan fungsional ya pak. Pengawasan yang lain yakni pengawasan struktural, pengawasan sesuai dengan struktur organisasi atau jabatannya”. Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Sedangkan pengawasan tidak langsung yang dilakukan terhadap para pegawai di Dinas UPT PUPR MANonjaya Kabupaten Tasikmalaya dibagi menjadi pengawasan rutin, pengawasan berkala dan tidak berkala/mendadak.

Pengawasan secara rutin dilakukan dengan mengisi presensi pegawai setiap hari dan juga mewajibkan bagi setiap pegawai untuk ijin tiap kali akan meninggalkan kantor atau meninggalkan pekerjaannya. Pengawasan berkala biasanya dilihat dari rapat kerja atau briefing yang diadakan tiap dua minggu sekali, hal yang lain dapat ditunjukkan dengan laporan hasil kerja bulanan dan laporan hasil kerja tahunan. Sedangkan pengawasan tidak berkala/mendadak artinya pengawasan dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya, misalnya dengan diadakannya rapat secara mendadak, pimpinan meminta laporan hasil kerja langsung setelah kegiatan dilaksanakan.

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami----->

Vol. 2 No. 2 hal. 220 - 234

Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Informan 5 pada wawancara tanggal 20 Januari 2006 pada pukul 12.00 WIB sebagai berikut : “Pengawasan yang dilakukan disini ada beberapa cara ya pak, ada pengawasan yang dilakukan langsung, tidak langsung, rutin, berkala dan mendadak/tidak berkala. Disini harus mengisi absen tiap hari dan harus minta ijin kalau ada kepentingan pribadi pada saat jam kerja. Bentuk pengawasan yang lain, dibuat laporan hasil kerja tiap kita mendapat tugas/pekerjaan biasanya bisa mendadak, bulanan maupun tahunan pokoknya dalam periode tertentu gitu. Disini juga diadakan briefing tiap dua minggu sekali, tapi kalo kalau lagi ada pekerjaan banyak dan para pegawai sibuk kadang-kadang briefing-nya sebulan sekali”.

Hal senada juga dikemukakan oleh Informan 6 pada wawancara tanggal 28 Januari 2021 pada pukul 08.30 WIB sebagai berikut : “Pengawasan yang dilakukan pimpinan kepada para pegawai itu sebagian besar secara tidak langsung ya pak, karena kan pimpinan itu tugasnya banyak sekali. Kalau yang bisa mengawasi langsung itu ya para Sub Bagian terhadap para stafnya masing-masing. Tetapi agar pimpinan tetap bisa mengawasi bawahannya, harus ada data-data kegiatan para pegawai. Misalnya, adanya absen yang rutin setiap hari, adanya laporan-laporan hasil kerja baik yang berkala maupun yang mendadak”.

Dengan data-data dan berbagai penjelasan diatas maka dapat diketahui bahwa secara keseluruhan yang mengawasi para pegawai adalah Kepala UPT PUPR Wilayah Manonbjaya Kabupaten Tasikmalaya dan Kepala sub Bagian kepada para stafnya masing-masing. Karena Kepala Dinas tidak bisa mengawasi seluruh pegawai karena kesibukan dan karena rentan jabatan terlalu jauh.

Pengawasan yang berlangsung di Dinas UPT PUPR Manonjaya Kabupaten Tasikmlaya adalah pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung (rutin, berkala, tidak berkala/mendadak), pengawasan yang diterapkan di instansi pemerintahan (pengawasan melekat, pengawasan fungsional dan pengawasan struktural).

Hambatan Proses Pengawasan Infrastruktur di Dinas PUPR UPT Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya

Hambatan-hambatan pengawasan Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa untuk memberlakukan pengawasan yang baik adalah pengawasan yang dilakukan secara obyektif bukan subyektif. Pengawasan juga bukan sekedar mencari-cari kesalahan pegawai tetapi pengawasan yang dilakukan untuk membimbing, mendidik pegawai. Karena pengawasan yang dilakukan secara subyektif hanya akan menimbulkan efektivitas yang semu, jadi pegawai akan berlaku baik ketika dilihat saja dan akan melakukan hal yang berbeda dibelakang pimpinan. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan di Dinas UPT PUPR Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya adalah adanya budaya sungkan karena hubungan antara pimpinan dan pegawainya sudah sangat dekat dan akrab sehingga pimpinan segan untuk mengawasi pegawainya dalam melakukan tugas dan pekerjaannya. Dan juga mungkin karena Kepala Dinas adalah seorang wanita, seperti yang dikatakan oleh banyak orang bahwa wanita itu lebih halus dan menggunakan segala sesuatunya dengan perasaan sehingga ada rasa segan untuk menegur pegawai yang kurang menyelesaikan tugasnya dengan baik

Seperti yang dikemukakan oleh Informan 2 pada wawancara tanggal 26 Januari 2021 Pada Pukul 12.30 WIB sebagai berikut : “Ada ya pak hambatan dalam kegiatan pengawasan disini. Yang pertama, adanya beban psikologis dari pimpinan apabila yang

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami----->

Vol. 2 No. 2 hal. 220 - 234

bersangkutan tidak konsekuen dan konsisten dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Yang kedua, adanya rasa sungkan atau segan yang tidak beralasan karena pimpinan dengan yang dipimpin itu hubungannya sudah sangat dekat ya mbak, sehingga apabila bawahan melakukan penyimpangan dalam pekerjaannya pimpinan merasa segan untuk menegurnya”.

Hal yang sama juga juga diungkapkan Informan 3 pada wawancara tanggal 25 Januari 2021 pada pukul 12.20 WIB sebagai berikut : “Hambatan ya pak? Ya mesti ada. Dalam melakukan pengawasan hambatannya adalah budaya sungkan yaitu pimpinan merasa segan untuk menegur pegawainya karena hubungan diantara kami itu sudah sangat dekat, seperti keluarga sendiri”.

Terbatasnya waktu dalam pelaksanaan pengawasan Untuk melakukan pengawasan dibutuhkan waktu yang tidak sedikit dan frekuensi yang sering agar pelaksanaan pengawasan dapat efektif dan maksimal. Kurangnya waktu yang dimiliki pimpinan untuk melakukan pengawasan dikarenakan pimpinan tidak hanya bekerja di kantor saja, tetapi juga harus melaksanakan tugasnya diluar kantor bahkan sampai keluar kota, sehingga pimpinan hanya kadang-kadang saja mengawasi para pegawainya. Misalnya kalau ada waktu luang dikantor, pimpinan menyempatkan waktu untuk melihat pekerjaan yang dilakukan oleh pegawainya. Seperti halnya briefing, briefing dilakukan hanya pada saat ada acara-acara tertentu.

Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Informan 4 pada wawancara tanggal 25 Januari pada pukul jam 11.15 WIB sebagai berikut : ‘Hambatan yang lain dalam pelaksanaan pengawasan adalah terbatasnya waktu untuk melakukan pengawasan ya pak, waktunya banyak digunakan untuk urusan-urusan dinas diluar sehingga pekerjaan di dalam kantor kurang mendapat perhatian. Misalnya ya pak, terjadi kelambatan membagi tugas dan pekerjaan karena pimpinan telat dalam mendisposisi surat sehingga pekerjaan itu terkesan mendadak”.

Hal yang sama juga juga diungkapkan Informan 5 pada wawancara tanggal 25 Januari 2021 pada pukul 12.00 WIB sebagai berikut : “Hambatannya mungkin karena waktu ya pak, pekerjaan pimpinan itu sangat banyak, tidak hanya dikantor saja tapi juga diluar kantor bahkan luar kota. Jadi pelaksanaan pengawasan tidak bisa berjalan dengan baik dan ini akan berakibat para pegawai kurang efektif dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya”. Dari berbagai data di atas dapat dijelaskan bahwa hambatan dalam kegiatan pengawasan yang dilakukan pimpinan adalah masih adanya budaya segan atau sungkan karena adanya sifat yang sangat menghormati sehingga merasa segan untuk mengawasi dan kurangnya waktu dari pimpinan untuk mengawasi para pegawainya.

Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Proses Pengawasan Infrastruktur di Dinas PUPR UPT Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya

Upaya Mengatasi Hambatan Dengan berbagai hambatan dalam kegiatan pengawasan di Dinas UPT PUPR Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya yang sudah dikemukakan di atas maka harus ada cara dalam mengatasi hambatan tersebut yaitu Pimpinan harus bisa bersikap tegas terhadap para pegawai tanpa membedakan status dan jabatannya. Pimpinan tidak boleh membedakan antara pegawai yang diawasinya walaupun ada hubungan yang baik diantara mereka dengan menghilangkan rasa segan tetapi tetap menghormati pegawainya.

Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Informan 6 pada wawancara tanggal 26 Januari 2021 pada pukul 12.30 WIB sebagai berikut : “Untuk mengatasi

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami----->

Vol. 2 No. 2 hal. 220 - 234

hambatan dalam pengawasan tadi ya pak, pimpinan itu harus bisa memberikan teladan yang baik mbak, dengan begitu bawahan akan ikut seperti yang dilakukan oleh atasan sehingga para pegawai akan bekerja lebih baik lagi. Yang lain mbak, pimpinan tidak perlu segan untuk menegur yang salah atau tidak mematuhi peraturan yang berlaku sehingga diperlukan sikap tegas juga dalam hal ini". Hal senada juga dikatakan oleh Responden pada wawancara tanggal 25 Januari 2021 pada pukul 11.15 WIB sebagai berikut : Pimpinan harus mempunyai sikap tegas dan harus punya wibawa juga ya mbak, walaupun seorang wanita tapi malah tambah bagus kalau punya wibawa ya pak, itu semua untuk menghilangkan rasa sungkan tadi".

Pimpinan lebih banyak meluangkan waktu untuk mengawasi pegawainya Untuk mengatasi hambatan yaitu terbatasnya waktu yang dimiliki pimpinan dalam pelaksanaan pengawasan maka sesibuk apapun pimpinan harus meluangkan waktu untuk mengawasi bawahannya. Misalnya tugas-tugas dinas luar kantor yang bisa diwakilkan, dapat pimpinan wakikan pada kepala bagian tertentu untuk melaksanakannya. Hal lain dapat berupa pelaksanaan briefing secara rutin (misalnya setiap dua minggu sekali) tidak hanya pada saat-saat ada acara tertentu saja, untuk melakukan evaluasi terhadap hasil kerja pegawai dan dapat melakukan perbaikan jika ada kekeliruan-kekeliruan. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Informan 1 pada wawancara tanggal 25 Januari 2021 pada pukul 11.15 WIB sebagai berikut : "Pimpinan harus meluangkan waktunya ya pak, sesibuk apapun itu bawahan harus diperhatikan dan diawasi sehingga bawahan akan berusaha dengan sungguh-sungguh. Tetapi dalam mengawasi juga harus diberi nasehat-nasehat atau bimbingan-bimbingan agar walaupun tidak diawasi, bawahan tetap bekerja baik".

Hal senada juga dikemukakan oleh Informan 2 pada wawancara tanggal 22 Januari 2021 pada pukul 08.30 WIB sebagai berikut : "Untuk mengatasi hambatan waktu tadi ya mbak, pimpinan seharusnya lebih meluangkan waktunya untuk berada di kantor dan sering mengadakan briefing, dengan briefing yang rutin pegawai akan dapat mengemukakan apa saja kesulitan mereka dalam melakukan pekerjaan sehingga pimpinan dapat mengevaluasi dan memberikan bimbingan serta jalan keluar dari permasalahan tersebut. Dengan komunikasi pula dapat ditentukan pula Tupoksi dari masing-masing jabatan sehingga ada job description yang jelas diantara para pegawai". Dari data-data diatas dapat dijelaskan bahwa upaya untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pengawasan adalah dengan sikap tegas dari pimpinan dan juga pimpinan harus meluangkan sedikit waktunya untuk mengawasi bawahannya walaupun dalam kondisi sesibuk apapun.

Temuan Studi Tentang Kajian Pengawasan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk lebih menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang atau sudah dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Oleh karena itu, perlu diterapkan pengawasan yang baik yaitu pengawasan yang dilakukan untuk membimbing, mendidik pegawai dan tanpa melukai perasaan pegawai. Permasalahan yang terjadi di Dinas UPT PUPR Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya adalah apakah pengawasan yang dilakukan sekarang berperan dalam meningkatkan efektivitas kerja pegawai. Untuk lebih jelasnya berikut ini disajikan temuan studi yang dihubungkan dengan teori yang terdiri dari peranan pengawasan di Dinas UPT PUPR Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya, hambatan yang dihadapi dalam pengawasan di UPT PUPR Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya dan cara mengatasi hambatan dari pelaksanaan pengawasan di UPT PUPR Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya. Untuk lebih jelasnya

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami----->

Vol. 2 No. 2 hal. 220 - 234

akan diuraikan sebagai berikut :

1. Peranan Pengawasan

Dari hasil wawancara dengan para Responden UPT PUPR Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya, secara keseluruhan berpendapat bahwa bahwa pengawasan itu memang sangat penting untuk meningkatkan efektivitas kerja pegawai yang memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap mekanisme pemeliharaan infrastruktur yang sudah berjalan. Hal tersebut telah dijabarkan dengan jelas beserta alasan-alasan yang sudah jelas pula di bagian sebelumnya. Peranan pengawasan adalah untuk mengetahui kekeliruan atau kesalahan sedini mungkin dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga akan dapat diketahui diawal, hal ini untuk memudahkan dalam melakukan perbaikan terhadap kesalahan atau penyimpangan tersebut. Peranan yang lain adalah Untuk mengetahui, apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Djati Julistriarsa dan John Suprihanto (1998:102) bahwa peranan pengawasan adalah mencegah terjadinya berbagai penyimpangan atau kesalahan-kesalahan, artinya bahwa pengawasan yang baik adalah suatu pengawasan yang dapat mencegah kemungkinan terjadinya berbagai bentuk penyimpangan, kesalahan ataupun penyelewengan. b. Untuk memperbaiki berbagai penyimpangan atau kesalahan yang terjadi, artinya dengan adanya pengawasan haruslah dapat diusahakan cara-cara tindakan perbaikan terhadap penyimpangan atau kesalahan.

2. Pelaksanaan Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan di UPT PUPR Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya ini dilakukan oleh kepala dinas/pimpinan di Dinas UPT PUPR Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya. Disamping itu pengawasan yang digunakan di Dinas UPT PUPR Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya adalah pengawasan yang sering digunakan di lingkungan pemerintahan diantaranya pengawasan melekat, pengawasan fungsional dan pengawasan struktural. Sementara itu cara pengawasan yang diterapkan di UPT PUPR Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya ini dilakukan dengan berbagai cara yaitu dengan pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.

Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pengawasan dalam melaksanakan suatu pekerjaan tentunya kita pernah mengalami suatu hambatan yang besar maupun kecil. Begitu juga dalam pelaksanaan pengawasan di UPT PUPR Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya ini juga mempunyai hambatan-hambatan yaitu adanya budaya sungkan karena hubungan antara pimpinan dan pegawainya sudah sangat dekat dan akrab sehingga pimpinan segan untuk mengawasi pegawainya dalam melakukan tugas dan pekerjaannya. Dan juga mungkin karena Kepala Dinas adalah seorang wanita, seperti yang dikatakan oleh banyak orang bahwa wanita itu lebih halus dan menggunakan segala sesuatunya dengan perasaan sehingga ada rasa segan untuk menegur pegawai yang kurang menyelesaikan tugasnya dengan baik.

Terbatasnya waktu dalam pelaksanaan pengawasan Untuk melakukan pengawasan dibutuhkan waktu yang tidak sedikit dan frekuensi yang sering agar pelaksanaan pengawasan dapat efektif dan maksimal. Kurangnya waktu yang dimiliki pimpinan untuk melakukan pengawasan dikarenakan pimpinan tidak hanya bekerja di kantor saja, tetapi juga harus melaksanakan tugasnya diluar kantor bahkan sampai keluar kota.

Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Pengawasan Dengan adanya hambatan-hambatan tersebut di atas, maka harus dicari cara penyelesaiannya. Berikut ini adalah cara-cara untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pengawasan di UPT PUPR Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya diantaranya yaitu :

1. Pimpinan harus tegas dalam pelaksanaan pengawasan dengan tidak membedakan antara pegawai yang satu dengan pegawai yang lain dan tidak mengurangi rasa hormat terhadap para bawahannya.
2. Pimpinan lebih banyak meluangkan waktu untuk mengawasi pegawai dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan yang telah diberikan kepada masing-masing pegawai, walaupun sibuk apapun pimpinan harus meluangkan waktu untuk mengawasi bawahannya. Misalnya tugas-tugas dinas di luar kantor yang bisa diwakilkan, dapat pimpinan wakikan pada kepala bagian tertentu untuk melaksanakannya. Hal lain dapat berupa pelaksanaan briefing secara rutin untuk melakukan evaluasi terhadap hasil kerja pegawai dan dapat melakukan perbaikan jika ada kekeliruan-kekeliruan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan guna untuk menjawab dari rumusan masalah penelitian yaitu sebagai berikut

1. **Proses pengawasan pemeliharaan insfrastruktur di UPT PUPR wilayah Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya**

Berdasarkan hasil analisa penelitian dan analisa yang dilakukan oleh peneliti mengenai pengawasan pemeliharaan infrastruktur di UPT PUPR Wilayah Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya sudah terlaksana dengan baik meskipun masih ada sedikit kendala dikarenakan adanya rasa sungkan antara pimpinan dengan karyawan dimana proses pengawasan harus ditingkatkan lebih baik lagi.

2. **Upaya yang dilakukan untuk melakukan pengawasan pemeliharaan insfrastruktur di UPT PUPR Wilayah Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya**

Upaya pengawasan yang dilakukan guna untuk meningkatkan system pemeliharaan insfrastruktur yaitu dengan metode pengawasan langsung yang dilaksanakan ditempat kegiatan berlangsung, misal mengadakan inspeksi mendadak (Sidak) dan pemeriksaan. Selanjutnya dengan pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan yang dilaksanakan dengan mengadakan pemantauan dan pengkajian terhadap laporan dari pejabat atau satuan kerja yang bersangkutan, aparat pengawas fungsional, pengawasan legislatif maupun pengawasan masyarakat.

REFERENSI

- Adisasmita, S.A. 2012. *Perencanaan infrastruktur Jalan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Alfiandri, Ulvi Fandri. 2016. *“Pengawasan Pemeliharaan Jalan Oleh Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungpinang”* Elisabeth P, Megaria. 2015. *“Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dalam Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Kabupaten Toba Samosir”*
- Choliq, Abdul. 2011. *“Pengantar Manajemen”*. Semarang. Rafi Sarana Perkasa
- Handyaningrta, Soewarno. 1982. *“Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Management”*. Jakarta: PT Inti

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami----->

Vol. 2 No. 2 hal. 220 - 234

- Ernie, S. T., & Saefullah, K. 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana. Maringan, M. S. (2004). *Dasar-dasar dan Administrasi Manajemen*. Jakarta:
- Fadlan. 20XX. “*Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Jalan Kabupaten Oleh Dinas Bina Marga, Pengairan dan Tata Ruang*, (Studi Kasus di Kabupaten Paser”
- Ghalia Indonesia Mulyadi. 2007. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Selemba Empat.
- Hakim, Muhamad Lukman Al. 2015. “*Studi Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemeliharaan Jalan Kota di Kota Surabaya*”
- Handoko, T. H. 1995. *Manajemen personalia dan sumber daya manusia*. Yogyakarta :BPFE.
- Harahap, S. 2001. *Sistem Pengawasan Manajemen*. Jakarta: Penerbit Quantum.
- Hasibuan, M. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Pengertian Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.
- Herujito,H.Melayu. 2005. *Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara Manullang. 2006. *Dasar ± dasar Manajemen*, Yogyakarta : Penerbit Gadjah Mada University Press
- Husnaini, U. 2001. *Manajemen Teori Praktik Dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Idayu Press. Handoko, T. Hani. 1999. “*Manajemen*”. Yogyakarta. BPFE. Handoko, T. Hani. 2003. “*Manajemen*”. Cetakan 18.Yogyakarta. BPFE Yogyakarta Harahap.
- Kartini Kartono. 1980. *pengantar Metodologi Riserch Sosial*. Alumni Bandung. Halaman 15.
- Lubis, I. 1985. *Pengendalian dan pengawasan proyek dalam masyarakat*. Jakarta timur: Ghalia Indonesia.
- M. Situmorang, Viktor dan Juhir. 2001. “*Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Negara*”. Jakarta: PT. Rineka Cipta 8 Manullang, Drs. “*Pengantar Ekonomi Perusahaan*”. Edisi Revisi Yogyakarta. Medan BLKM.1982-1991.
- Mannulang, M. 2002. *Dasar –dasar manajemen*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press.
- Moh Nazir. 2005. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta. Halaman 48.
- Muhammad Ali. 1982. *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*. Angkasa. Bandung. Halaman 120. Hadari Nawawi. 1996. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Gadjah Mada Universitas Pres. Yogyakarta. Halaman 63.
- N M. Manulang 2002.“*Dasar - dasar Manajemen*”.Cetakan 16.Yogyakarta. Gadjah Mada University Press Purwanto, I. 2006. “*Manajemen Strategi*”. Bandung" : Penerbit CV. Yrama Widya.
- Prayudi. 1981. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Samsudin, Sadili. 2006. “*Manajemen Sumber Daya Manusia*”. Bandung: Pustaka Setia.
- Sastrohadiwiryo. 2002. *DasarDasar Manajemen*. Yogyakarta: Penerbit Andi Sarundajang,H. 2005. *Babak Baru Sistem Pemerintah Daerah*. Jakarta: Kata Hasta Pustaka
- Siagian.S.P. 2000. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Silalahi,Urbert. 2003. *Studi Tentang Ilmu Administrasi Dan Konsep Teori Dan Dimensi*. Bandung: Sinar Baru Algesindo JOM FISIP Volime 3 No. 2 Oktober 2016 Page 14
- Soejito,Irawan. 2000. *Pengawasan Terhadap Perda dan Kepala Daerah*. Jakarta: Bina Aksara Sugiyono. 2009. *Statistik untuk penelitian*. Bandung: Alfabetha. Sujamto.

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami----->

Vol. 2 No. 2 hal. 220 - 234

2004. Sistem Pengawasan Manajemen, Jakarta: PT. Pustaka Quantum
- Sofyan Sari. 2001. *Sistem Pengawasan Manajemen (Management Control System)*. Jakarta: PT. Pustaka Quantum Hasibuan, Malayu S.P. (2001). "Manajemen Sumber Daya Manusia". Jakarta. PT. Bumi Aksara Hasibuan, Malayu S.P. 2005. "Manajemen Sumber Daya Manusia". Edisi Revisi. Bumi Aksara, Jakarta.
- Sondang P. Siagian. 2001. Fungsi-fungsi Manajerial, Penerbit PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Sugiono, 2002. "Metode Statistik ", Bandung: Tarsito.
- Sugiyono, 1998. Statistika untuk Penelitian. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono. 2002. Metode penelitian Administrasi. Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono. 2007. Statistika Untuk Penelitian. Bandung. Penerbit: CV. Alfabeta
- Sule Erni Trisnawati, dan Kurniawan Saefullah. 2005. "*Pengantar Manajemen*". Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Penerbit: Prenada Media, Jakarta.
- Winardi. 2000. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Yayat M. Herujito. 2001. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: P.T. Grasindo. Peraturan Perundangan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Tata Kerja, Dan Perincian Tugas Perangkat Daerah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011, Tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan Undang – Undang No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Jurnal, Skripsi, dan Tesis.